

ABSTRAKSI

Penggunaan transaksi tunai oleh masyarakat semakin berkembang khususnya transaksi yang dilakukan dengan cara menukarkan rupiah ke dalam mata uang asing yang diperoleh di gerai penukaran uang dan membawa uang tersebut ke luar negeri. Hal ini mengakibatkan uang asing dalam pecahan besar menjadi alat salah satu suap yang semakin banyak digunakan koruptor untuk mempersulit pelacakan aliran dana kepada pihak penerima dana. Oleh karena itu, guna memberantas tindak pidana pencucian uang dibentuklah kerjasama yang dilakukan antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan yang berwenang untuk menindaklanjuti seseorang melakukan tindak pidana kejahatan seseorang yang tidak melaksanakan laporan pembawaan uang tunai.

Skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam skripsi ini dibahas tentang kewajiban pelaporan yang dilakukan oleh pembawa uang tunai ke dalam atau keluar daerah pabean, paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilainya setara dengan itu. Dalam skripsi ini juga dibahas tentang pelaksanaan kewajiban pembawa uang tunai ke dalam atau keluar daerah pabean yang tidak taat melaporkan uang tunai paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilainya setara dengan itu ke Bea dan Cukai.

Kata Kunci : Kewajiban Pelaporan Pembawa Uang Tunai, Pertanggungjawaban Pembawa Uang Tunai.

ABSTRACT

The use of cash transaction in society is increasing especially such a transaction which is done by way of exchanging rupiah into foreign currency gotten from the money changer outlet and then carrying it abroad. This results to the excessive use of foreign currency done by the corruptors as bribes in order to distract the efforts of tracking the fund source or terminating the track of funds gotten by the receivers. Therefore, in order to prevent money laundry, there is a cooperation the Center for Financial Transactions and Reports Analysis whose authority is to take action against a criminal act done by those who do not register their cash transfer report.

This thesis uses a type of juridical normative research using an approach legislation and conceptual approach. In this thesis are discussed an obligation of reporting cash transfer done by the cash transfer agents in or out the custom area, at least Rp.100.000.000,00 (one hundred million) or equivalent value to it. It also discusses the implementation of the obligation reportes to Custom an Excise.

Keywords : Reporting Obligation of Cash Transfer Agent, Liability of Cash Transfer Agent.

